

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional adalah interaksi yang dilakukan antar negara dan antar bukan negara yang melewati batas-batas negara. Tujuan dari interaksi ini adalah bahwa suatu negara tidak mungkin berdiri sendiri dan memerlukan negara lain untuk memenuhi kepentingan nasionalnya atau negaranya. Dalam studi hubungan internasional sendiri, terdapat beberapa elemen penting yaitu aktor internasional, kepentingan nasional dan kekuasaan, beberapa hal tersebut dapat membantu untuk menjelaskan mengapa setiap negara saling berinteraksi. Setiap negara dalam kaitannya dengan negara lain tentu memiliki sebuah tujuan, dan tujuan tersebut yang mengarah pada terciptanya kepentingan nasional.

Kepentingan nasional ini menjadi formula bagi setiap negara untuk membuat sebuah kebijakan luar negeri terhadap negara lain. Pada dasarnya, kepentingan nasional didasarkan pada keputusan negara yang didasarkan atas kesejahteraan rakyatnya, dalam hal ini kita dapat mengajukan pertanyaan dengan menjelaskan apa yang kita inginkan dari sebuah negara, dan setidaknya ada lima dasar nilai yang kita ingin negara melakukannya, yaitu keamanan, kebebasan, pemerintahan, keadilan dan kesejahteraan (Jackson & Sorensen, 2010, 2).

Dalam mencapai kepentingan nasional ini, setiap negara dapat melakukan kerja sama dengan negara lain. Baik kerja sama bilateral, regional maupun

multilateral. Salah satu kerja sama yang telah terjalin cukup lama adalah kerja sama antara Amerika Serikat dengan Israel.

Hubungan keduanya bermula pada tahun 1948 ketika Amerika Serikat sebagai negara pertama yang mengakui Israel sebagai sebuah negara. Bahkan dalam situs resmi Amerika Serikat, selain telah menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah negara pertama yang mengakui Israel pada tahun 1948, Amerika Serikat pun adalah yang pertama mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel pada tahun 2017. Israel telah lama, dan tetap, mitra paling terpercaya Amerika di Timur Tengah. Israel dan Amerika Serikat terikat erat oleh ikatan sejarah dan budaya serta kepentingan bersama (<https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3581.htm>, diakses pada 5 Maret 2019).

Sebuah Laporan dari Komisi Kepentingan Nasional Amerika Serikat yang dilaporkan dalam jurnal karya Graham Allison, seorang profesor di Universitas Harvard serta direktur Pusat Ilmu Pengetahuan dan Hubungan Internasional Belfer, menjabarkan klasifikasi kepentingan nasional yang dimiliki Amerika Serikat, yaitu yang pertama ialah kepentingan vital, *extremely important*/sangat penting, *important*/penting dan *secondary*.

Keamanan dan pertahanan nasional Amerika Serikat menjadi yang utama, dalam bidang keamanan antara lain: pertama, untuk melindungi kepentingan vital dan mengamankan perdamaian, mencegah agresi, mencegah, meredakan, dan mengelola krisis, menghentikan proliferasi senjata pemusnah massal dan memajukan kontrol dan pelucutan senjata, yang kedua ialah untuk menjaga kestabilan lokal dan regional yang tidak mengancam keamanan dan kesejahteraan

Amerika Serikat atau sekutunya dan yang ketiga yaitu mengurangi ancaman Senjata Pemusnah Massal (diakses pada 8 Mei 2019 melalui <https://www.state.gov/s/d/rm/rls/perfrpt/2002/html/18996.htm>).

Maka dari itu, setiap tahunnya Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar lebih dari \$3 miliar dalam pembiayaan militer terhadap Israel. Selain bantuan keuangan, Amerika Serikat berpartisipasi dalam pertukaran tingkat tinggi latihan militer yang di dalamnya tercakup latihan militer bersama, penelitian militer dan pengembangan senjata (<https://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3581.htm> diakses pada 16 Maret 2019), tindakan ini menambah jumlah persediaan senjata Amerika Serikat di Israel.

Bantuan dana militer untuk Israel tersebut adalah sebagai cara untuk menghadapi ancaman yang berpeluang dari luar, terutama hari ini yang berasal dari Iran, dimana kedua pemimpin beranggapan bahwa ancaman dari Iran akan terjadi kapan saja dan mereka harus bersiap apabila itu terjadi, hal ini pun didukung dengan pernyataan Netanyahu yang menyambut baik keputusan Donald Trump untuk keluar dari perjanjian nuklir Iran dimana ia beranggapan bahwa nuklir Iran berbahaya bagi keamanan dunia.

Bagi Israel sendiri, tujuan kerja sama ini pun untuk keamanan nasional negaranya, Israel yang berada dikawasan Timur Tengah yang berada ditengah negara-negara Arab terancam keamanannya. Banyak pertentangan yang muncul dari negara-negara Arab terkait deklarasinya sebuah negara Israel, selain itu konflik yang tidak berkesudahan antara Israel dengan Palestina, dimana Organisasi Kerja Sama Islam dengan negara-negara Arabnya mendukung

Palestina dan menentang Israel yang merupakan ancaman keamanan dan keberlangsungan berdirinya negara Israel.

Pemenuhan kepentingan nasional tidak hanya melalui kerja sama, pada kenyataannya, dalam mencapai tujuan nasional masing-masing negara, adakalanya muncul konflik yang tidak dapat terelakkan. Konflik dapat terjadi karena perbedaan kepentingan serta perbedaan nilai yang dianut. Perbedaan kepentingan atau kepentingan nasional setiap negara tentu berbeda dan seringkali berbenturan dalam prakteknya.

Salah satu konflik dalam hubungan internasional yang memiliki sejarah panjang adalah perebutan kota suci Yerusalem antara Israel dan Palestina yang membawa konsekuensi tersendiri terhadap perjalanan sejarahnya. Yerusalem telah menjadi ajang persengketaan dari waktu ke waktu. Hingga tulisan ini dibuat, telah berbagai macam cara penyelesaian ditempuh namun masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Setiap kawasan di Yerusalem memiliki populasi tersendiri. Orang beragama Kristen memiliki dua kawasan, karena orang Armenia yang bermukim disana beragama Kristen. Kawasan Armenia ini, yang terkecil dari keempatnya, adalah salah satu pusat Armenia tertua di dunia, Gereja dan Biara St. James, yang mencakup sebagian besar kawasan mereka, dinding ratapan untuk agama Yahudi dan keberadaan Masjid untuk pemeluk agama Islam. Latar belakang kota suci Yerusalem dianggap penting oleh ketiga agama tersebut telah diteliti oleh wartawan BBC, Erica Chernofsky yang menemukan bahwa hal tersebut berkaitan dengan figur Ibrahim dalam kitab suci (diakses pada 7 Februari 2019 melalui

<http://www.tribunnews.com/internasional/2017/12/07/mengapa-kota-yerusalem-sangat-penting-bagi-umat-islam-kristen-dan-yahudi>).

Hingga hari ini, para penganut ketiga agama tersebut setiap tahun selalu datang ke tempat ini untuk beribadah atau sekedar berziarah. Beberapa tempat tersebut ialah Gereja Makam Kudus, yang menjadi tempat ziarah para penganut agama Kristen di seluruh dunia, selanjutnya bagi pemeluk agama Islam terdapat masjid Al-Aqsa dan berisi tempat suci Kubah Batu atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dome of the Rock, terakhir Tembok Ratapan dimana setiap tahun orang-orang Yahudi dari seluruh dunia mengunjungi tempat ini untuk berdoa (diakses pada 7 Maret 2019 melalui <https://www.jerusalem-insiders-guide.com/western-wall-in-jerusalem.html>). Berdasarkan hal tersebut, kota Yerusalem sangat penting bagi ketiga agama dari seluruh dunia yang setiap tahun mengunjungi kota suci tersebut, pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel tidak hanya mengundang protes dari negara-negara Arab maupun Palestina, namun dari para penganut ketiga agama besar.

Konflik perebutan Yerusalem antara Israel dan Palestina merupakan salah satu konflik yang telah lama berlangsung dan paling banyak menarik perhatian masyarakat dunia. Bagi kedua belah pihak yang bersengketa, status Yerusalem memiliki arti tersendiri bagi kemerdekaan dan eksistensi mereka, perwujudan dari esensi nasional dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Oleh karena itu konflik tidak dapat dihindarkan dan selalu menimbulkan banyak korban.

Menurut data dari UN-OCHA/*United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB),

setidaknya lebih dari seratus ribu korban terluka dari pihak Palestina dan sebelas ribu dari pihak Israel terhitung dari tahun 2000 hingga saat ini (<https://www.unocha.org/> diakses pada 30 Maret 2019). Konflik persengkataan wilayah antara Israel dan Palestina ini telah lama terjadi dan hingga hari ini belum menemukan titik penyelesaian, hal ini terkait kepentingan yang berbeda dan saling berbenturan antara satu pihak dengan pihak lainnya, ditambah dengan adanya intervensi asing dari luar pihak yang bersengketa menjadikan konflik ini semakin rumit.

Status Yerusalem sendiri merupakan masalah paling sensitif dan kontroversial dalam konflik antara Arab dengan Israel. Selain sebagai eksistensi bagi Palestina dan Israel, posisi Yerusalem merupakan tempat yang strategis, seiring dengan keberadaan penduduk yang padat, banyak aset strategis terletak disini, seperti Bandara Ben-Gurion, Pelabuhan Ashdod, pembangkit listrik, markas perbankan, susunan basis data terkomputerisasi, pangkalan militer vital, dan markas utama semua cabang keamanan — IDF, Mossad, dan Layanan Keamanan Umum (diakses pada 2 Mei 2019 melalui <https://jiss.org.il/en/the-strategic-importance-of-jerusalem/>).

Bahkan setiap tahunnya, banyak orang yang berasal dari ketiga agama tersebut yang datang dari seluruh dunia untuk berdoa maupun berziarah. Selain itu, dalam tulisannya, “Dampak Strategis Menjadikan Yerusalem Ibukota Israel”, Anthony H. Cordesman, ketua strategi dalam CSIS/*Center for Strategies and International Studies* Amerika, menjabarkan bahwa dampak yang ditimbulkan Yerusalem menjadi ibukota Israel membuat populasi Yahudi terus meningkat, dan

populasi Palestina di Yerusalem akan terus mendapat tekanan (diakses pada 2 Mei 2019 melalui <https://www.csis.org/analysis/strategic-impact-making-jerusalem-capital-israel>), ini berpengaruh terhadap eksistensi keberlangsungan hidup mereka.

Donald Trump mengatakan, Amerika Serikat tetap berkomitmen pada solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina, namun dengan adanya pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel, tentu saja bertentangan dengan komitmen tersebut serta dengan kebijakan luar negeri Amerika Serikat selama tujuh dekade terakhir terkait status Yerusalem. Hal ini pun bertentangan dengan beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB.

Berikut ini sejumlah resolusi DK PBB menyangkut status Yerusalem yang dibuat selama 50 tahun terakhir, dan didukung Amerika Serikat yang dilansir dari

Tempo:

NO.	RESOLUSI	TANGGAL
1.	Resolusi 242	22 November 1967
2.	Resolusi 252	21 Mei 1968
3.	Resolusi 465	1 Maret 1980
4.	Resolusi 478	20 Agustus 1980
5.	Resolusi 672	12 Oktober 1990
6.	Resolusi 1073	28 September 1996
7.	Resolusi 1322	7 Oktober 2000
8.	Resolusi 1397	12 Maret 2002
9.	Resolusi 2334	23 Desember 2016

Pengakuan kota Yerusalem sebagai ibukota Israel melanggar resolusi Majelis Umum PBB nomor 181 tahun 1947 dimana status Yerusalem adalah wilayah yang berada di bawah kewenangan internasional, dan diberikan status hukum dan politik yang terpisah (*separated body*). Resolusi ini juga memberikan mandat berdirinya negara Arab (Palestina) dan negara Yahudi (Israel) yang masing-masing berstatus merdeka (UN document, 'Chapter 12: The Status of Jerusalem':9). Pelanggaran yang dilakukan oleh Amerika Serikat bukan hanya pernyataan terhadap dunia, namun telah berujung ke aksi pemindahan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, hal ini memancing reaksi masyarakat internasional, Amerika Serikat telah melakukan berulang kali pelanggaran dan berusaha untuk melindungi Israel, bahkan ketika Dewan Keamanan membuat rancangan resolusi yang berisi desakan untuk menolak keputusan Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, Amerika Serikat sekali lagi menggunakan hak veto untuk resolusi tersebut.

Dinamika hubungan antara Amerika Serikat dan Israel pada masa kepemimpinan Trump berawal dari sebelum Trump menjabat hingga akhirnya menjabat sebagai Presiden. Salah satu janji kampanye Presiden Amerika adalah mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel, namun Presiden Amerika sebelumnya seperti Barack Obama mengesampingkan mengenai janji tersebut. Dalam pernyataannya, Trump telah menepati janji kampanye tersebut yang sebelumnya belum terealisasi. Selain pengakuan tersebut, janji kampanye lainnya ialah pemindahan kedubes Amerika atas Israel ke Yerusalem (diakses

pada 25 maret 2019 melalui <https://news.detik.com/internasional/3759255/akui-yerusalem-ibu-kota-israel-trump-penuhi-janji-kampanye>).

Konflik perebutan kota Yerusalem ini tidak hanya melibatkan antara Israel dan Palestina, namun juga beberapa aktor internasional lainnya ikut terlibat, seperti Amerika Serikat, beberapa negara Arab, Organisasi Kerja Sama Islam dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Babak berikutnya negara-negara Arab masuk dan ikut menyerang Israel yang selanjutnya dikenal dengan perang Arab-Israel yaitu negara-negara Arab seperti Mesir, Lebanon, Jordan, Irak, Suriah, Yaman dan Arab Saudi melawan Israel (Fawcett, 2009:231-233).

Intervensi Amerika Serikat terhadap Israel diawali oleh Senator Harry Truman yang mendukung gerakan zionisme, dalam buku *The United States in the Middle East*, Michael C. Hudson memaparkan analisis kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, yaitu minyak dan Israel, ketergantungan Amerika Serikat terhadap minyak juga berpengaruh terhadap daya ekonomi Amerika Serikat, minyak sebagai sumber daya yang dibutuhkan dalam memproduksi berbagai produk seperti senjata, bahan bakar, produksi barang dan lainnya.

keterlibatan dan intervensi Amerika Serikat berawal pada tahun 1948 dimana Israel mendeklarasikan secara sepihak berdirinya negara Israel di Palestina, yang beberapa menit kemudian diakui oleh Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Harry Truman saat itu. Selain dukungan untuk mengakui berdirinya negara Israel, dukungan Amerika Serikat terhadap Israel terlihat dari penggunaan hak veto oleh Amerika Serikat dalam Dewan Keamanan Perserikatan

Bangsa-Bangsa, dari total 82 kali hak veto yang digunakan oleh Amerika Serikat, sebanyak 42 kali digunakan untuk melindungi Israel dari resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Malcolm dalam Sangga, 2017:7).

Beberapa resolusi yang dibuat Majelis Perserikatan Bangsa-bangsa yang di veto oleh Amerika Serikat terkait Israel ialah resolusi nomor 11898 pada tahun 1975, dimana isinya mendesak agar Israel menghentikan seluruh serangan militer melawan Lebanon, disini Amerika Serikat tercatat sebagai satu-satunya negara yang memveto putusan tersebut, kemudian pada tahun 1982, Amerika Serikat memveto tujuh resolusi, didalamnya termasuk sanksi yang dijatuhkan kepada Israel karena mencaplok Dataran Tinggi Golan dan kecaman atas upaya pembunuhan terhadap Wali Kota Nablus, Bassam Shakaa, Pada tahun 1983, Washington memveto sebuah rancangan resolusi yang mengecam pembantaian pengungsi Palestina di kamp Sabra dan Shatila di Lebanon. Amerika juga telah melindungi Israel saat rancangan resolusi mengecam pelanggaran kesucian Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, pengambilalihan tanah Palestina, serta tindakan keras dan represif Israel terhadap warga Palestina (diakses pada 5 April 2019 melalui Ferida, 2017. <https://www.liputan6.com/global/read/3202038/berapa-kali-as-gunakan-hak-veto-untuk-bela-israel-ini-jawabannya>).

Setelah perjalanan panjang konflik di Yerusalem dari tahun 1948 hingga saat ini, puncak baru permasalahan sengketa terkait status Yerusalem terjadi pada Rabu 6 Desember 2017 lalu, ketika Donald Trump, dalam pidatonya di Gedung Putih mengejutkan dunia dengan mendeklarasikan bahwa Yerusalem sebagai ibukota dari Israel, hal ini dilakukan setelah beberapa hari Donald Trump terpilih

sebagai Presiden ke 45 Amerika Serikat. Hal ini mendapat protes keras dari dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dampak yang muncul adalah keputusan tersebut akan memicu terjadinya ketidakstabilan di kawasan Timur Tengah dan mengganggu proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

Dibawah kepemimpinan Donald Trump dengan kebijakan '*First America*'nya, Trump menekankan aliansi yang lebih dekat dengan Israel. Untuk itu, Trump bergerak cepat untuk merangkul perdana menteri Israel yang berhaluan keras, Benjamin Netanyahu. Dia mendukung perluasan permukiman Israel di Tepi Barat dan memutuskan untuk memindahkan kedutaan Amerika Serikat ke Yerusalem dari Tel Aviv. Keputusan kedutaan mendapat teguran oleh konsensus internasional yang menyerukan agar status Yerusalem diselesaikan dalam pembicaraan damai dengan Palestina. Ironisnya, Trump tidak menerima konsesi dari Israel sebagai imbalan atas keputusan kedutaannya. Trump bereaksi dengan mengancam akan memotong bantuan ke negara mana pun yang memberikan suara menentang Amerika Serikat (Powaski, 2019: 240). Berikut beberapa pertemuan penting antara Amerika Serikat dibawah kepemimpinan Donald Trump dengan Israel:

1. *Joint Readout of Meeting Between President Donald J. Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu* atau kesepakatan bersama antara keduanya pada tanggal 15 Februari 2017, pertemuan tersebut bertempat di Kantor Oval Gedung Putih, Washington D.C Amerika Serikat. Adapun pertemuan tersebut membahas peningkatan kerja sama antara kedua belah pihak, Trump menggaris bawahi bahwa Amerika Serikat akan terus

memegang komitmen terhadap keamanan Israel. Selain itu, kedua pemimpin telah mengarahkan tim masing-masing untuk membentuk kelompok kerja bersama dalam beberapa bulan ke depan untuk secara dramatis meningkatkan hubungan bilateral di sejumlah bidang, termasuk *cyber*, intelijen, keamanan, perdagangan, teknologi, melawan ancaman yang diajukan oleh Iran dan aktor-aktor lain dan mempromosikan kerja sama Arab-Israel, termasuk kerja sama ekonomi.

2. *Readout of Meeting Between President Donald J. Trump and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu* pada tanggal 23 Mei 2017, Donald Trump melakukan kunjungan resmi pertama sebagai Presiden ke Israel dan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Kedua pemimpin menegaskan kembali ikatan khusus antara Amerika Serikat dan Israel. Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu membahas rencana bersama mereka untuk lebih meningkatkan hubungan dengan berfokus pada peningkatan kerja sama di berbagai isu, termasuk keamanan regional dan *cyber*, perdagangan, teknologi, inovasi, dan penelitian.
3. *Readout of President Donald J. Trump's Meeting with Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel* pada tanggal 18 September 2017. Dalam pertemuan di New York tersebut, kedua belah pihak menegaskan kembali ikatan yang tidak terputus antara Amerika Serikat dan Israel serta membahas kerja sama mereka yang berkelanjutan. Selain itu, Presiden meyakinkan Perdana Menteri bahwa di bawah kepemimpinannya dan Duta Besar Haley, Amerika Serikat akan menentang perlakuan tidak adil terhadap Israel di PBB.

4. Pertemuan antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari Israel di Washington DC pada tanggal 5 Maret 2018. Pertemuan pertama setelah deklarasi Yerusalem sebagai ibukota Israel disertai keputusan pemindahan kedutaan Amerika Serikat di Tel Aviv ke Yerusalem.
5. *Readout of President Donald J. Trump's Meeting with Prime Minister Benjamin Netanyahu of Israel* pada tanggal 26 September 2018, Presiden Donald Trump berbicara dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tentang Israel selama Majelis Umum PBB. Presiden Trump menegaskan kembali ikatan yang tidak bisa dipecahkan antara kedua negara dan komitmen Amerika Serikat untuk memastikan keamanan Israel. Presiden Trump dan Perdana Menteri Netanyahu membahas koordinasi erat mereka yang berkelanjutan dalam melawan pengaruh buruk Iran. Presiden juga menekankan komitmennya untuk mencapai kesepakatan damai abadi antara warga Israel dan Palestina.
6. *Readout of the Vice President's Meeting with Israeli Minister of Defense Avigdor Lieberman* pada tanggal 7 Maret 2019, Wakil Presiden Mike Pence bertemu dengan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman di kantornya. Wakil Presiden menggarisbawahi ikatan yang tidak dapat dipecahkan antara Amerika Serikat dan Israel dan menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat untuk menegakkan keunggulan militer kualitatif Israel. Wakil Presiden dan Menteri Lieberman sepakat tentang perlunya melawan ancaman yang ditimbulkan oleh Iran dan para proksinya serta organisasi-organisasi

teroris, dan membahas cara-cara di mana militer mereka dapat bekerja lebih dekat bersama untuk mengatasi ancaman bersama (diakses pada 2 Mei 2019 melalui www.whitehouse.gov/statements).

Berdasarkan data-data pertemuan di atas, Amerika Serikat selalu menggarisbawahi bahwa Amerika Serikat akan selalu memegang komitmen terhadap keamanan Israel, ini menjadikan bahwa hubungan mereka sangatlah dekat. Bahkan, dibawah kepemimpinan Donald Trump, beberapa hal-hal kontroversial dilakukan Trump terkait Israel, Ia berhasil mewujudkan salah satu janji kampanye Presiden Amerika Serikat yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel yang oleh Presiden Amerika Serikat sebelum-sebelumnya seperti Barack Obama belum dapat mewujudkan janji tersebut.

Terkait dengan deklarasi Yerusalem sebagai ibukota Israel, ini tidak lepas dari sosok Trump. Donald Trump merupakan presiden Amerika Serikat pertama yang berhasil mewujudkan janji ibukota tersebut. Ini tidak lepas dari karakter Donald Trump itu sendiri yang mendapat pengaruh yang besar dari ayahnya, yaitu Fred Trump. Dalam buku yang berjudul *Ideals, Interests and U.S Foreign Policy from George H.W Bush to Donald Trump* karya R.E Powaski dikatakan bahwa ayahnya berpesan kepada Trump bahwa hidup adalah perjuangan kompetitif antara pemenang dan pecundang. Dia menyebut pemenang sebagai "pembunuh", dan jika menjadi seorang pecundang, Ia bukanlah siapa-siapa (Powaski, 2019: 233).

Selain itu, Dan McAdams, seorang profesor psikologi di Universitas Northwestern, adalah seorang psikolog yang berusaha menjelaskan perilaku

Trump. Dia menilai Trump sebagai orang yang sangat ekstrovert, agresif, narsis dan orang yang kurang menyenangkan. McAdams menambahkan, orang yang kurang menyenangkan yang memiliki sifat kasar, sombong dan kurang empati.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, peneliti tertarik untuk membahas masalah ini untuk bahan penelitian dengan judul “Kepentingan Amerika Serikat dalam pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel tahun 2017”.

Adapun beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema ini ialah pertama, skripsi karya Imam Kurniawan dari jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang yang berjudul “*Kepentingan Amerika Serikat dalam Invasi Irak tahun 2003*”. Dalam skripsi tersebut, Imam memaparkan serangkaian serangan dan intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Irak dimana Irak diserang secara militer atas dasar tuduhan meyimpan senjata pemusnah massal NUBIKA (Nuklir, Biologi, dan Kimia), rezim pemerintahan yang tidak demokratis, serta mendukung para pelaku teror yang menghancurkan pusat kendali ekonomi Amerika Serikat, WTC (*World Trade Center*) di New York pada 11 September tahun 2001 lalu.

Alasan lain atas serangan tersebut adalah Irak merupakan negara di kawasan Timur Tengah yang sangat menentang Amerika Serikat serta gerakan zionisme, terutama saat Irak berada dibawah kepemimpinan Saddam Hussein dengan partainya yaitu Ba’ath Irak. Dalam pandangan Irak, Zionisme Israel merupakan proyek imperialisme dan fasisme baru negara-negara Barat. Bagi Irak,

negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat tidak perlu ikut campur terhadap urusan negara-negara lain, terutama negara-negara di Kawasan Timur Tengah.

Perbedaan penelitian Imam dengan peneliti sendiri adalah dalam hal konten/isi, Imam fokus ke serangkaian kebijakan dan serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam invasi Irak pada tahun 2003, sedangkan peneliti lebih memfokuskan ke kepentingan Amerika Serikat terhadap Israel dalam kasus pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel.

Kedua, skripsi karya Nurlita Aprilinasari dari Universitas Muhammadiyah Malang jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang berjudul "*Strategi AIPAC (American-Israel Public Affairs Committee) terhadap Kebijakan Luar Negeri AS Era George Walker Bush terkait Konflik Israel dan Palestina*" yang di dalamnya Nurlita memaparkan bagaimana *lobby* Israel melalui organisasi pro-Israel yaitu AIPAC (*American-Israel Public Affairs Committee*) yang merupakan organisasi induk ratusan organisasi Yahudi di Amerika yang memonitor birokrasi Amerika Serikat.

AIPAC sendiri adalah organisasi para bangsa Yahudi di Amerika Serikat yang memiliki kepentingan untuk mempengaruhi setiap kebijakan yang dibuat oleh Amerika Serikat dalam persengketaan antara Israel dan Palestina, baik melobi melalui sisi finansial maupun politik. Tujuan dari AIPAC sendiri selain bekerja untuk kepentingan Amerika Serikat, juga melakukan strategi demi kepentingan ekonomi dan politik Israel.

Berbeda dengan skripsi karya Nurlita tersebut, peneliti tidak hanya berfokus pada organisasi atau badan pembuat keputusan di pemerintahan Amerika

Serikat, fokus utama peneliti kali ini adalah kepentingan di pihak Amerika Serikat, berbeda dengan Saudari Nurlita yang menjabarkan lobi yang dilakukan oleh pihak Israel dalam mempengaruhi Amerika Serikat.

Ketiga, Jurnal volume 1 nomor 1 tahun 2018, dari Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi karya Melita Angelin Bidara, Michael Mamentu dan Trilke Tulung dengan judul “*Kepentingan Amerika Serikat dalam Konflik Laut China Selatan*” yang berisi intervensi Amerika Serikat dan kepentingannya dalam konflik laut China Selatan.

Konflik Laut China Selatan adalah konflik yang berada di kawasan Laut China Selatan, yaitu klaim atas pulau beserta gugus karangnya, klaim garis batas laut teritorial, landasan kontinen, dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) diantara negara-negara yang berada di kawasan tersebut, diantaranya terdapat Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara/ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) dan China. Selain kedua belah pihak tersebut, Amerika Serikat pun turut ikut campur dalam persengketaan tersebut, bagi Amerika Serikat sendiri, Laut China Selatan merupakan pendukung kekuatan mobilitas pasukan militer yang dimilikinya, dominasi Amerika Serikat skala global dan Amerika Serikat memiliki keterkaitan kerja sama perdagangan yang tinggi dengan negara-negara di kawasan Laut China Selatan. Menurut pandangan Amerika Serikat, perairan Laut China Selatan merupakan jalur perairan internasional yang tentu saja perlu dijaga kestabilan keamanannya.

Perbedaan dengan penelitian milik peneliti sendiri ialah, konteks intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam rangka kepentingan

nasionalnya. Dalam jurnal ini, Amerika Serikat berkepentingan di kawasan Laut China Selatan yang tidak ingin didominasi China berhasil dalam klaim atas perairan ini, sedangkan dalam penelitian yang dibuat peneliti, fokus kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah, terutama terhadap Israel yang bertujuan agar Israel menjadi 'kepanjangan' kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah dan tidak ingin negara Arab lainnya menjadi dominan.

Keempat, jurnal volume 9 nomor 1 dalam Majalah Ilmiah Unikom, program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik karya Ibu Dewi Triwahyuni dengan judul "*Signifikansi Kawasan Asia Tenggara dalam Kepentingan Amerika Serikat*" dimana berisi uraian kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara.

Dalam jurnal tersebut dijelaskan, posisi Asia Tenggara yang menguntungkan karena letak yang strategis yaitu di persimpangan industri, teknologi dan kekuatan militer. Tidak hanya itu, dengan jumlah penduduk yang padat membuat kawasan Asia Tenggara menjadi pasar yang menguntungkan bagi Amerika Serikat. Selain daripada itu, dalam jurnalnya, Ibu Dewi memaparkan bahwa kawasan Asia Tenggara merupakan '*The Second Front War of Terrorism*' dimana kawasan Asia Tenggara dikhawatirkan menjadi tempat sarang lahirnya gerakan terorisme, karena kawasan Asia Tenggara yang memiliki penduduk muslim terbesar, keadaan politik yang masih labil dan pengaturan keamanan yang masih longgar, yang tentu saja bagi Amerika Serikat dapat membahayakan kepentingan Amerika Serikat dikhawatirkan dapat menjadi sarang lahirnya terorisme.

Disini dapat kita lihat bahwa kepentingan nasional Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara selain dalam bidang ekonomi, ialah mencegah munculnya terorisme-terorisme, sesuai dengan yang dikumandangkan oleh Amerika Serikat ke seluruh penjuru dunia yaitu '*War Againsts Terrorism*' sebagai salah satu kebijakan yang dibuat Amerika Serikat.

Fokus penelitian Ibu Dewi terkait kepentingan Amerika Serikat dikawasan Asia Tenggara, dan arti penting posisi serta ancaman Asia Tenggara bagi Amerika Serikat, sedangkan penelitian peneliti, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berfokus pada kepentingan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah yang telah dipelajari oleh peneliti di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Politik Luar Negeri, mata kuliah ini mempelajari dasar-dasar mengapa sebuah negara melakukan interaksi dengan negara lain. Bagaimana dalam mencapai tujuannya, sebuah negara membutuhkan kerja sama dengan pihak lain dengan menggunakan daya serta strategi yang dimiliki. Contohnya seperti kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat terkait dengan pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel pada tahun 2017 silam.
2. Studi Keamanan Internasional, mata kuliah ini mempelajari tentang konsep keamanan. Konsep keamanan sendiri berhubungan dengan adanya perasaan yang dipersepsikan oleh masyarakat terkait dengan perasaan

aman dilingkungan dimana mereka berada. Sama seperti dalam konflik Israel-Palestina, kedua pihak menuntut rasa aman dimana mereka berada.

3. Hubungan Internasional di kawasan Timur Tengah, mata kuliah ini mempelajari bagaimana keadaan politik, sejarah, ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Timur Tengah, dan salah satu kawasan di Timur Tengah ialah kota Yerusalem berada yang masih diperebutkan hingga hari ini.
4. Hubungan Internasional di kawasan Amerika, mata kuliah ini mempelajari bagaimana keadaan politik, sejarah, ekonomi, sosial dan budaya di kawasan Amerika. Kaitannya dalam penelitian kali ini, peneliti mencoba menelaah kepentingan Amerika Serikat terkait kebijakan pengakuan Yerusalem sebagai Ibukota Israel.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Adapun rumusan masalah mayor dalam penelitian ini adalah “Apa kepentingan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel?”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Apa saja kepentingan Amerika Serikat dengan pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel?
2. Bagaimana hubungan Amerika Serikat dengan Israel pasca pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel?
3. Bagaimana reaksi masyarakat internasional terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan untuk membantu peneliti fokus terhadap masalah yang ingin diteliti agar penelitian tersebut tidak melebar dari pokok permasalahan yang ada sehingga tujuan dari penelitian tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini ialah pertama, luas lingkup penelitian hanya meliputi informasi terkait kepentingan Amerika Serikat dalam mendukung Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Kedua, Informasi yang disajikan yaitu : latar belakang Amerika Serikat mendukung Yerusalem sebagai Ibukota Israel, informasi seputar hubungan antara Amerika Serikat dengan Israel termasuk di dalamnya perjanjian yang telah dibuat, dan terakhir periode waktu hubungan antara ke dua negara sebelum Trump dilantik menjadi Presiden hingga momen ketika pemindahan dan peresmian kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepentingan apa dari Amerika Serikat terkait pendeklarasian Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Adapun tujuan dari penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui kepentingan Amerika Serikat dengan pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel.
2. Untuk mengetahui kepentingan yang didapat Israel dengan pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel.
3. Untuk mengetahui status Yerusalem dalam pandangan Amerika Serikat, Israel, Palestina dan Organisasi Kerja sama Islam dan masyarakat dunia.

4. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara Amerika Serikat dengan Israel pasca pengakuan Yerusalem sebagai ibukota Israel.
5. Untuk mengetahui tindakan yang diambil masyarakat internasional terhadap dukungan Amerika Serikat terkait Yerusalem sebagai Ibukota Israel.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan memberikan tambahan pembedaharaan pustaka, serta dapat memberikan sedikit sumbangsih bagi Ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional, Politik Luar Negeri dan Studi Keamanan Internasional serta memahami sejauh mana dampak yang akan terjadi dari pendeklarasian kota suci Yerusalem sebagai Ibukota Israel.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Diharapkan dapat menambah wawasan dan berguna bagi penulis dan para pembaca penelitian ini.
2. Diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih jauh mengenai permasalahan perebutan kota suci Yerusalem oleh tiga agama di kota tersebut.